

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini akan membahas teori dan studi terkait dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori tentang pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.

#### **2.1. Teori Demokrasi**

Demokrasi menurut Cheibub *at al.* merupakan rezim, di mana institusi pemerintah dipenuhi sebagai konsekuensi dalam pemilihan yang diperebutkan. Ada tiga sifat demokrasi, yaitu :

- a. *Ex ante uncertainty*, yaitu hasil pemilihan tidak diketahui sebelum terjadi.
- b. *Ex post irreversibility*, yaitu pemenang dalam pemilihan umum benar – benar menjabat.
- c. *Repeatability*, yaitu pemilihan yang memenuhi dua kriteria pertama terjadi pada interval reguler dan diketahui.

Rezim diklasifikasikan sebagai demokrasi jika memenuhi keempat kriteria berikut, yaitu :

- a. Kepala eksekutif harus dipilih dalam pemilihan umum atau oleh sebuah badan yang dengan sendirinya dipilih secara populer.
- b. Badan legislatif harus dipilih secara populer.
- c. Harus ada lebih dari satu partai yang bersaing dalam pemilihan.
- d. Sebuah pergantian kekuasaan berdasarkan peraturan pemilihan yang sama dengan yang diajukan pejabat pemerintahan yang harus dilakukan.

Menurut Acemoglu (2006), demokrasi mengarah pada pilihan sosial yang lebih disukai oleh mayoritas warga negara. Oleh karena itu, warga lebih suka demokrasi

terhadap nondemokrasi, dan hasil demokrasi ketika warganya memiliki kekuatan politik yang memadai. Institusi politik dalam demokrasi memainkan peran mendasar yaitu mengatur alokasi kekuasaan politik di masa depan di antara berbagai kelompok sosial, karena masyarakat hidup di dunia yang dinamis. Individu tidak hanya peduli terhadap kebijakan yang berlaku saat ini tetapi juga tentang kebijakan yang berlaku pada masa yang akan datang.

Demokrasi ditentukan oleh faktor – faktor berikut :

a. Masyarakat sipil

Masyarakat yang tidak terorganisir akan sulit menuju transisi demokrasi. Oleh karena itu, beberapa tingkat perkembangan dalam masyarakat sipil juga diperlukan untuk demokratisasi.

b. Guncangan dan krisis

Demokratisasi terjadi karena sifat sementara kekuatan politik *de facto*. Krisis dan guncangan makroekonomi semacam itu secara intrinsik mengarah pada fluktuasi jangka pendek dalam kekuatan politik secara *de facto*.

c. Sumber Pendapatan dan Komposisi Kekayaan

Bagi kaum elit sumber pendapatan menjadi penentu yang penting dari *trade-off* antara demokrasi dan represi. Perbedaan sikap antara pemilik tanah dengan pemilik modal fisik dan modal manusia terhadap demokrasi, yaitu :

1. Tanah lebih mudah digunakan untuk pajak daripada modal fisik dan manusia. Oleh karena itu, pemilik tanah lebih takut dengan demokrasi daripada nondemokrasi, yang membuat mereka lebih menolak demokrasi.
2. Pergolakan sosial dan politik mungkin akan lebih merusak pemilik modal fisik dan manusia yang harus bergantung pada kerja sama di tempat kerja dan

dalam proses perdagangan, yang membuat pemilik lahan lebih bersedia menggunakan kekuatan untuk melestarikan rezim yang mereka pilih.

3. Berbagai set lembaga ekonomi dimungkinkan dalam ekonomi agraris yang dominan, yang mempengaruhi intensitas relatif preferensi elit dan warga negara dengan rezim yang berbeda.

d. Institusi politik

Institusi politik yang demokratis dapat disusun untuk membatasi kekuatan mayoritas. Gagasan tentang demokrasi representatif, yang bertentangan dengan demokrasi partisipatoris atau langsung, dapat dilihat sebagai usaha untuk mencairkan tekanan populis dan merongrong kekuatan mayoritas.

e. Globalisasi

Globalisasi memiliki peran untuk terlaksananya demokrasi, seperti :

1. Integrasi keuangan internasional berarti bahwa pemilik modal, elit, dapat dengan lebih mudah mengeluarkan uang mereka dari negara tertentu.
2. Perdagangan internasional mempengaruhi harga faktor dan, melalui saluran ini, memodifikasi redistributif politik.
3. Meningkatnya perdagangan internasional juga berarti bahwa terganggunya kegiatan ekonomi dapat menjadi lebih mahal bagi banyak negara tertinggal yang sekarang terintegrasi ke dalam ekonomi dunia dan oleh karena itu, represi sekarang mungkin jauh lebih mahal bagi elite, sekali lagi mendukung demokrasi.
4. Peningkatan integrasi politik dan berakhirnya Perang Dingin mungkin menyiratkan bahwa negara-negara yang menekan warganya dapat mengharapkan sanksi dan reaksi yang lebih kuat dari dunia demokratis.

## 2.2. Ukuran Demokrasi

Berdasarkan Polity IV, demokrasi dikaitkan dengan seperangkat institusi tertentu, seperti pemilihan yang bebas dan adil, pertanggungjawaban politisi kepada pemilih, dan bebas masuk ke dalam politik. Demokrasi diukur dengan menggunakan indeks *Freedom House* dengan rentang indeks 1 – 7. Angka 7 dalam indeks tersebut mewakili kebebasan politik paling sedikit dan paling banyak kebebasan. Suatu negara mendapatkan skor 1 jika hak politik paling dekat dengan cita-cita seperti dalam pertanyaan berikut, apakah ada pemilihan umum yang bebas dan adil ? Apakah mereka yang terpilih sebagai penguasa ? Apakah ada partai kompetitif atau kelompok politik lainnya ? Apakah oposisi memainkan peran penting dan memiliki kekuasaan yang sebenarnya, dan apakah kelompok minoritas memiliki pemerintahan sendiri yang masuk akal atau dapat berpartisipasi dalam pemerintah melalui konsensus informal ?

Indeks otokrasi Polity juga berkisar antara 0 sampai 10 dan dibangun dengan cara yang mirip dengan skor demokrasi berdasarkan penilaian negara-negara sesuai dengan daya saing partisipasi politik, peraturan partisipasi, keterbukaan dan daya saing rekrutmen eksekutif, dan hambatan terhadap kepala badan Eksekutif.

## 2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Demokrasi

Menurut Huntington (1960) dalam Kriekhaus (2012), demokrasi mampu menimbulkan dampak negatif yaitu memungkinkan untuk membuka celah tuntutan bagi kelas – kelas di parlemen supaya terwakili dengan baik melalui kebijakan fiskal dan kebijakan radikal yang dapat mengancam hak kepemilikan. Menurut Olson serta Przeworski dan Limongi dalam Kriekhaus (2012), menyatakan bahwa dampak negatif demokrasi yaitu dapat membuka banyak jalan representasi yang

memungkinkan pencarian rente dan tuntutan lainnya kepada negara. Konsekuensi yang jelas dari teori-teori ini adalah dengan adanya tuntutan terhadap negara yang lebih luas maka dampak negatif demokrasi akan lebih tinggi.

Dampak positif demokrasi secara umum didasarkan atas pendapat tentang demokrasi yang lebih baru. Demokrasi dapat digunakan untuk mengusir para ‘penjahat’ yang korup beserta dengan kroninya. Dampak positif demokrasi juga didasarkan atas pendapat North dalam Kriekhaus (2012), yaitu institusi yang demokratis dapat digunakan untuk mencegah kaum elit supaya tidak menindas masyarakat kecil.

Menurut Tavares dan Wacziarg (2001) dalam Arif dkk. (2012), demokrasi juga memiliki hubungan tidak langsung yang digambarkan melalui delapan saluran, yaitu :

a. Modal manusia

Menurut Tavares dan Wacziarg (2001) dalam Arif dkk (2012), modal manusia merupakan komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Demokrasi sangat responsif terhadap kebutuhan dasar warga negara dan cenderung memilih kebijakan untuk mempromosikan akumulasi modal manusia, sehingga modal mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

b. Ketidakstabilan politik

Menurut Feng (1997) dalam Arif dkk. (2012), demokrasi menyediakan lingkungan politik yang stabil, yang mengurangi perubahan pemerintah yang tidak konstitusional dalam sistem politik. Artinya, demokrasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Kualitas pemerintahan

Menurut Tavares dan Wacziarg (2001) dan Batiz (2002) dalam Arif dkk. (2012), demokrasi memungkinkan penduduk untuk tetap mengawasi dan mengendalikan kualitas pembuatan kebijakan, karena demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk secara damai dan teratur menggulingkan pemerintah yang tidak kompeten, tidak efisien, dan korup.

d. Ukuran pemerintah (*Government size*)

Belanja pemerintah yang lebih besar, berarti pajak yang harus dibayar oleh masyarakat juga lebih besar. Artinya, hal tersebut cenderung mengurangi pertumbuhan ekonomi. Menurut Plumper dan Martin (2003) dalam Arif dkk. (2012), semakin demokratis sebuah negara, semakin baik kualitas pengeluaran pemerintah.

e. Ketimpangan pendapatan

Menurut Gupta dkk. (1998) dan Muller (1995) dalam Arif (2012), ketika pendapatan per kapita meningkat, ketimpangan pendapatan juga meningkat. Berdasarkan Hipotesis U terbalik Kuznets tentang ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi, tingkat ketimpangan pendapatan akan menurun, karena negara – negara mendekati tahap maju.

f. Perdagangan yang terbuka

Demokrasi memberi kesempatan bagi semua produsen untuk memperoleh keuntungan dari pasar bebas. Menerapkan keterbukaan perdagangan akan meningkatkan tingkat persaingan produk pasar internal, dan dengan demikian, akan memanfaatkan transmisi teknologi untuk mengakses pasar yang lebih besar

dan dapat memberikan insentif untuk disiplin kebijakan yang lebih besar melalui transmisi ekonomi regional atau global.

g. Akumulasi modal fisik

Menurut Tavares dan Wacziarg (2001) dalam Arif (2012), tingkat demokratisasi mungkin berdampak pada tingkat akumulasi modal fisik, karena proses politik bisa melakukan pendistribusian pendapatan nasional antara modal dan tenaga kerja, yang dihasilkan dari memberikan suara yang lebih besar kepada serikat pekerja dan kepentingan tenaga kerja.

h. Investasi

Menurut Pourgerami (1998) dan Gupta dkk. (1998) dalam Arif (2012), investasi merupakan saluran penting dalam mempengaruhi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Adanya investasi mampu meningkatkan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga negara. Jika pendapatan warga negara meningkat, mereka akan meningkatkan tuntutan apapun termasuk tuntutan untuk memperbaiki hak partisipasi politik dan kebebasan sipil yang akan memperbaiki penerapan proses demokrasi di masyarakat.

Penelitian terkait dengan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, pernah dilakukan di mancanegara. Beberapa peneliti berpendapat bahwa demokrasi merupakan hal yang pertama kali harus ada untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Menurut Simon Kuznet dalam Guseh dan Oritsejafor (2005), untuk mendukung proses pembangunan politik dan ekonomi di negara barat, teknologi saja tidak cukup untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai, sebaiknya juga diikuti dengan lembaga – lembaga yang demokratis yang dapat memberikan kebebasan politik kepada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses politik, serta kebebasan ekonomi untuk berpartisipasi dalam ekonomi pasar.

Penelitian terkait dengan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil awalnya dibangun dengan menggunakan konsep model pertumbuhan Solow. Model pertumbuhan Solow dalam Todaro (2006) mengacu pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah atau bersama – sama. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun oleh para teoritis lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.

Berikut ini adalah model pertumbuhan Solow :

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha}$$

di mana  $Y$  adalah produk domestik bruto,  $K$  adalah stok modal fisik dan modal manusia,  $L$  adalah tenaga kerja, dan  $A$  adalah produktivitas tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen.

Para peneliti ini memasukkan unsur akumulasi modal manusia, dan tingkat output riil yang dipengaruhi oleh modal fisik, modal manusia dan jumlah tenaga kerja yang ditentukan melalui fungsi Cobb – Douglass dalam Helliwell (1994) :

$$Y_t = K_{(t)}^{\alpha} H_{(t)}^{\beta} A_{(t)} L_{(t)}^{1-\alpha-\beta}$$

di mana :  $Y$  adalah tingkat output riil,  $K$  adalah jumlah modal fisik,  $H$  adalah jumlah modal manusia,  $L$  adalah jumlah tenaga kerja, dan  $A$  adalah tingkat dari teknologi dengan tingkat pertumbuhan yang konstan sebesar  $g$ . Koefisien tersebut mengimplikasikan hasil yang konstan untuk semua faktor yang digunakan secara

bersama – sama, dengan demikian terdapat hasil yang menurun (*decreasing return*) untuk setiap kombinasi modal fisik dan modal manusia.

#### **2.4. Studi Terkait**

Penelitian yang dilakukan oleh Barro (1996) tentang demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan data panel dari tahun 1960 – 1990, menunjukkan bahwa variabel pemeliharaan aturan hukum, pasar bebas, konsumsi pemerintah, dan modal manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel demokrasi secara keseluruhan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebebasan politik akan tumbuh jika ada perbaikan standar hidup yang diukur melalui PDB dan adanya perbaikan terhadap status kesehatan dan pendidikan secara substansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Guseh dan Oritsejafor (2005) tentang demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data *time series* dari tahun 1960-1998 dan metode kuadrat terkecil (*ordinary least squares*) sebagai alat analisis, menunjukkan bahwa di negara Afrika Selatan, lembaga-lembaga demokrasi dan periode kebebasan politik dan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian di negara Ghana menunjukkan bahwa kebebasan politik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ukuran pemerintah (*government size*), tenaga kerja dan investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Krieckhaus (2006) menggunakan regresi data panel dari tahun 1960 – 2000, menemukan bahwa fungsi demokrasi sangat bergantung pada konteks politik regional. Fungsi demokrasi yang bergantung pada konteks politik regional menyebabkan kinerja ekonomi yang buruk seperti di wilayah Amerika Latin

dan di Asia, namun di sisi lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah negara Afrika.

Studi yang dilakukan Heo dkk. (2012) dengan menggunakan analisis *time series*, menyimpulkan bahwa transisi menuju demokrasi tidak memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Asia. Demokratisasi tampaknya tidak membantu atau menghambat pertumbuhan ekonomi di Asia.

Penelitian yang dilakukan oleh Masaki dkk. (2014) dengan menggunakan 43 negara sub Sahara Afrika, diperoleh hasil bahwa demokrasi berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan demokratis lebih terasa bagi negara-negara di Afrika.

